

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Politik merupakan hal yang tentunya sering dijumpai oleh masyarakat pada umumnya. Politik merupakan sesuatu yang memiliki arti atau makna yang banyak seiring dengan berjalannya perkembangan dan fenomena-fenomena terkait politik. Sehingga menjadikan politik memiliki makna yang beragam. Tentunya apa yang terjadi di masyarakat pasti di dalamnya terkait dengan politik. Politik sering dihubungkan dengan istilah kekuasaan, negara, pemerintahan, juga pastinya partai politik. Selain itu politik juga sering diartikan sebagai hal hal yang memiliki kandungan negatif seperti barang kotor, perbuatan manipulatif, kecurangan dan juga kejahatan (Mahfudz, 2022).

Dalam pengertian lain menurut Soltau bahwasannya politik merupakan studi tentang negara terutama berkaitan dengan bagaimana negara merancang, melaksanakan dan mengelola tujuannya. Dalam pengertian ini, politik bukan hanya sebatas aktivitas perebutan kekuasaan atau dinamika partai politik, tetapi lebih dari itu politik juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang struktur, tujuan dan interaksi antara negara dan masyarakatnya. Peranan lembaga-lembaga negara sebagai penanggungjawab untuk melaksanakan tujuan negara dan bagaimana negara mengelola hubungannya dengan warga negara (Supardan, 2008).

Kajian mengenai studi politik mengarahkan tujuan negara sebagai pokoknya. Sebagai entitas, negara berusaha mencapai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi seluruh warganya melalui sejumlah tujuan yang terencana rapi. Berbagai bahasan beberapa tujuan negara yakni penyediaan layanan publik yang berkualitas, terciptanya iklim ekonomi yang amat kondusif hingga pemeliharaan stabilitas sosial serta politik yang kokoh. Kegunaan pemerintah adalah meewujudkan tujuan-tujuan ini melalui sejumlah langkah yang terukur dan

sejalan dengan asas-asas demokrasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, negara memerlukan kerjasama dari pihak-pihak lain.

Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif memegang peranan penting dalam beberapa tahapan dari proses-proses ini. Lembaga eksekutif secara aktif menjalankan tanggung jawabnya dalam sejumlah kebijakan dan administrasi negara. DPR secara aktif ikut ambil serta dalam proses pembentukan undang-undang baru dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Lembaga yudikatif secara aktif terlibat dalam menegakkan hukum pada setiap kasusnya. Soltau dengan tegas mengutarakan politik sebagai bagian dari dinamika internal dari lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga memegang peranan krusial dalam rangka ikut campur dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara demi cita-cita pada visi misi nasional.

Aspek penting lainnya dalam pemahaman politik menurut Soltau adalah bagaimana negara mengelola hubungan dengan warga negara. Sehingga tidak mengherankan, masyarakat menyadari bahwa negara bukan hanya entitas yang mengatur kehidupan mereka. Negara berhubungan timbal balik dengan rakyatnya, yang dalam hal ini memberikan hak. Warga negara bisa memilih apakah untuk terlibat atau tidak dalam pengambilan keputusan politik di sejumlah negara, dan kebebasan bertindak ini diatur oleh undang-undang negara atau oleh konstitusi negara. Menggarisbawahi hak itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, memastikan jaminan sosial, menciptakan kondisi yang mendukung, dan mempromosikan kesejahteraan (Luqman, 2023).

Secara politik, negara dan warga negara memiliki pemikiran sosial yang dapat membuat interaksi yang saling menguntungkan antara keduanya. Negara sebagai korporasi yang mengelola kepentingan harus dilayani dan menjadi jawaban bagi kebutuhan warga negaranya. Warga negara diakui harus taat hukum dan mendukung terwujudnya indeks negara, salah satunya melalui partisipasi politik. Dalam studi politik tidak hanya fokus pada struktur kekuasaan atau kebijakan, melainkan juga bagaimana negara dan rakyat berinteraksi dalam suatu sistem yang seimbang dan adil (Pureklolon, 2016).

Selain itu, peran politik dalam membentuk sikap demokratis tentu saja sangat penting. Demokrasi yang ideal merupakan keadaan dimana keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak rakyat, yang memiliki hak untuk memilih pemimpin dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan. Dalam demokrasi yang ideal, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa adanya diskriminasi atau penekanan. Terdapat kebebasan untuk menyuarakan pendapat dengan rasa tanggungjawab, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selain itu setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin secara bebas (Nugroho, 2012).

Pada kondisi demokrasi yang ideal, pemerintahan harus transparan, dalam arti tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat publik harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selain itu penting untuk memastikan adanya mekanisme pemerintahan yang berjalan melalui pemilu yang teratur dan adanya pengawasan. Demokrasi yang ideal mencerminkan keberagaman dan juga kebebasan berpendapat. Dalam situasi ini, setiap individu atau kelompok dapat hidup dan berkembang tanpa rasa takut akan represi atau diskriminasi yang dilayangkan dari pihak manapun (Habib, 2020).

Dalam konteks demokrasi yang ideal, partai politik membantu menciptakan sistem yang transparan, akuntabel dan inklusif yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Partai politik bukan hanya sebagai organisasi yang mengusung calon pemimpin atau kebijakan tertentu, tetapi juga sebagai lembaga yang mendidik masyarakat untuk lebih memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak politik serta mekanisme pemilu. Melalui partai politik, warga negara diperkenalkan pada ideologi, visi, misi dan program-program yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan sosial dan politik.

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik berfungsi untuk meningkatkan kesadaran juga pengetahuan masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pengambilan keputusan politik lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang pasif, tetapi juga menjadi pemilih yang cerdas sehingga dapat mengevaluasi

dan memilih calon atau partai berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama. Dengan partai politik yang memberikan pendidikan politik, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana mekanisme demokrasi berjalan, mengenali beberapa isu sosial dan politik yang ada, serta menyadari betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pembangunan negara. Holdar dan Zakharchenko (2002) mengatakan bahwa pendidikan politik ditujukan sebagai upaya pendidikan publik dimana didalamnya ada keterlibatan warga negara untuk meningkatkan partisipasi. Tidak hanya peningkatan partisipasi, tetapi tentunya disertai dengan rasa tanggungjawab didalamnya (Sumanto, 2021).

Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri, menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik dan akhirnya mewujudkan demokrasi yang ideal dimana semua elemen masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pembangunan negara. Secara keseluruhan partai politik memainkan peran strategis dalam menciptakan pendidikan politik yang membangun dan menguatkan demokrasi yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ini tergambar dengan keikutsertaan masyarakat sebagai contoh menjadi bagian daripada panitia pelaksanaan pemilihan dimana tentunya dalam tugasnya harus dipenuhi dengan rasa tanggungjawab. Tujuan daripada diadakannya pendidikan politik diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki kesadaran dalam politik dan memunculkan kepribadian politik. Selain itu, tujuan dilaksanakannya pendidikan politik menjadikan masyarakat dapat memahami sesuatu yang terjadi dilingkup sosial politik dan mampu berfikir kritis sebagai bentuk daripada pemikiran yang bertujuan untuk membangun.

Tingkat partisipasi politik di Indonesia merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi yang berjalan. Dalam beberapa dekade terakhir Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal partisipasi politik. Salah satu pencapaian terbesar adalah pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dalam jumlah partisipasi yang cukup tinggi, tidak menjamin keberlangsungan pemilu berjalan dengan baik. Beberapa kelompok dengan

tingkat pendidikan rendah sering kali kesulitan untuk sepenuhnya memahami proses politik dan memilih secara rasional. Selain itu partisipasi dalam aktivitas politik lainnya seperti diskusi politik, kampanye atau bahkan pendidikan politik masih perlu ditingkatkan. Masyarakat yang tidak memahami hak-hak politiknya serta cara kerja sistem politik dan pemerintahan, seringkali hanya berpartisipasi secara simbolis atau karena kewajiban, bukan karena kesadaran politik yang mendalam. Menurut Kartini (2009:74) ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan pendidikan politik yang terjadi di Indonesia:

Yang pertama adalah, sangat sulit untuk membuat individu menyadari kondisi dan keadaan. Sebagian besar penderitaan individu terkait kemiskinan yang mereka alami adalah hasil dari banyak tahun menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan tekanan dan penajahan. Penduduk masyarakat miskin terbiasa dengan kurangnya kondisi jangka panjang yang harus mereka jalani. Orang-orang yang telah terbiasa dengan keterbatasan seumur hidup sulit membayangkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Keadaan sehari-hari seperti kemiskinan dan pengabaian terasa sangat nyata bagi orang-orang ini. Kebiasaan ini menciptakan keengganan mereka terhadap ideologi politik yang berisi tuntutan perubahan.

Oleh karena itu, ketika pendidikan politik mencoba masuk ke ranah masyarakat terkait atau membawa berita baru tentang hak-hak, partisipasi, dan kesadaran sosial harus disampaikan kepada individu, seringkali pesannya tidak akan diterima dengan mudah. Hal ini dikarenakan keadaan hidup mereka terjebak dalam keadaan yang memaksa mereka terfokus untuk memperjuangkan hidup ketimbang harus memikirkan isu politik atau sesuatu yang bukan ranah mereka. Dalam kasus ini, berita baru yang dibawa oleh politik yang berisi edukasi selalu harus dibungkus dalam realitas sosial-ekonomi masyarakat. Kemampuan untuk memahami atau empati terhadap penderitaan yang dialaminya akan terasa penting.

Kemudian yang kedua adalah, sikap politik apatis dan sinisme. Sikap politik apatis dan sinisme politik adalah faktor yang dinormalisasi oleh kesadaran politik yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berpikir dalam spektrum politik yang sebenarnya. Apatisme politik dan sinisme politik sering muncul di antara masyarakat ketika masyarakat memiliki satu pengalaman buruk dengan sistem

politik. Ini menimbulkan ideologi politik tertentu yang telah menjadi normal dalam pandangan masyarakat. Kedua aspek tersebut telah membawa masyarakat untuk melihat politik sebagai perwujudan dari kepura-puraan, korupsi, dan rekayasa (Nurjaman, 2024).

Apatisme politik muncul ketika masyarakat merasa tidak ada gunanya terlibat dalam politik karena mereka percaya bahwa suara mereka tidak akan didengar atau dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa politik hanyalah urusan elite yang tidak berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sementara itu, sinisme politik berkembang dari ketidakpercayaan terhadap politisi, partai politik atau lembaga-lembaga negara. Mereka melihat bahwa semua gerakan politik memiliki agenda tersembunyi atau lebih buruk lagi, mereka percaya bahwa para pelaku politik hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini gerakan politik sering dianggap sebagai sesuatu yang palsu atau hanya sekedar alat untuk meraih kekuasaan. Dengan apatisme yang mengakar dan sinisme yang meluas, masyarakat kehilangan kemampuan untuk berfikir kritis dan membedakan mana yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.

Ketiga, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah, sebagian besar masyarakat kesulitan memahami kerumitan permasalahan sosial dan politik di sekitar mereka sehingga lebih enggan untuk mencampuri atau terlibat dalam hal tersebut. Latar belakang pendidikan yang rendah sering kali menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, baik secara formal maupun non-formal, pemahaman mereka terhadap isu-isu sosial dan politik yang lebih kompleks menjadi terbatas (Sutrisman, 2019).

Tanpa kemampuan untuk memahami kerumitan permasalahan yang ada, mereka cenderung merasa kesulitan untuk mengidentifikasi akar masalah atau potensi solusinya. Hal ini membuat mereka enggan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam diskusi dan tindakan yang berkaitan dengan isu politik. Pendidikan yang rendah tidak hanya memengaruhi pengetahuan teknis atau teori tentang politik, tetapi juga kemampuan untuk berfikir kritis, menganalisis

situasi dan menghubungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keadaan sosial dan politik. Ketika masyarakat tidak dapat memahami bagaimana kebijakan atau keputusan politik mempengaruhi kehidupan mereka, mereka akan cenderung menghindari keterlibatan dalam proses tersebut.

Selain itu dengan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dan kesulitan pendidikan politik untuk diterima di masyarakat, didukung dengan banyaknya fenomena yang terjadi menjelang pemilu ataupun ketika berlangsungnya pemilu. Salah satu fenomena yang terjadi yaitu fenomena “ikut-ikutan” atau hal tersebut dapat disebut dengan istilah “*bandwagon effect*”. *Bandwagon Effect* atau fenomena “ikut-ikutan” ini merujuk kepada fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu terjadi kontestasi politik yang menggambarkan parade *marching band* pada politik, yaitu seperti gerobak yang membawa iring iringan musik yang diikuti oleh kerumunan besar yang mengikutinya dibelakang (Schmitt-Beck, 2015).

Bandwagon Effect dalam konteks politik merujuk pada kecenderungan individu untuk mengadopsi sikap atau perilaku politik tertentu dikarenakan mayoritas dan bukan karena penilaian mandiri terhadap pilihannya. Fenomena ini dapat berdampak signifikan terhadap hasil suara yang didapat dari pemilihan dan berdampak juga pada kualitas dari setiap partisipan politik. Di Indonesia, *bandwagon effect* sering terjadi menjelang pemilu terutama pada momen-momen kritis seperti saat kampanye atau hasil *survey* yang menunjukan kandidat tertentu unggul. Dalam data yang didapat dari hasil *survey* charta politika yang dilakukan oleh penulis pada bulan April 2023 di Kabupaten Bandung menunjukan bahwa 8 dari 10 narasumber yang diwawancarai menunjukan sikap *bandwagon effect*. Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah pemilih yang signifikan tentunya *bandwagon effect* menjadi hal yang serius bagi pemangku kepentingan politik. Fenomena ini berpotensi mengaburkan esensi demokrasi yang mengedepankan pilihan rasional dan partisipasi politik yang berkualitas.

Secara positif dampak fenomena *bandwagon effect* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketika banyak orang mulai mengikuti suatu

tren atau dukungan terhadap kandidat tertentu, hal ini dapat mendorong mereka yang awalnya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun dilain sisi, dalam keadaan banyak dan meningkatnya tingkat partisipasi, terdapat penurunan kualitas dari pemilih. *Bandwagon effect* berpotensi menyebabkan pemilih tidak memilih berdasarkan pertimbangan rasional, tetapi hanya mengikuti tren atau arus mayoritas.

Dalam upaya untuk menangani juga menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung, Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik yang memiliki peran sentral di Kabupaten Bandung melaksanakan upaya pendidikan politik. Sebagai partai politik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai definisi partai politik sebagai organisasi yang bercakupan nasional dan memiliki tujuan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai pendidikan politik merupakan hak dan juga kewajiban bagi setiap warga negara sebagai bentuk dari tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam uraian undang undang mengenai partai politik menggambarkan bahwa partai politik merupakan representatif dari nilai nilai demokrasi seperti yang dijelaskan Abraham Lincoln yang mana partai politik merupakan organisasi yang berasal dari rakyat kemudian dijalankan dan dipelihara oleh rakyat untuk menunjang kemajuan dan kesejahteraan rakyat dengan salah satunya pendidikan politik.

Pendidikan politik di Kabupaten Bandung dirasa masih sangat kurang, dengan fenomena *bandwagon effect* yang terjadi dan pemahaman juga sikap kritis yang dimiliki masyarakat masih minim. Maka dari itu pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik khususnya pendidikan politik oleh Partai Nasdem sangat penting bagi masyarakat, agar masyarakat tidak dibutakan oleh isu isu terkait politik yang sedang ramai. Selain itu agar masyarakat dapat memiliki usaha membentuk pribadi yang bertanggungjawab dalam politik (Kartono 1989:14).

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Bandung dalam kontestasi politik, pihak partai melaksanakan sosialisasi politik dan juga pendidikan restorasi. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain itu upaya ini merupakan dorongan partai agar dapat lebih memahami dan timbul kedekatan dengan masyarakat. Pendidikan politik menjadi krusial dalam upaya meningkatkan literasi politik dan membentuk pemilih yang kritis, sehingga dapat memitigasi dampak negatif dari *bandwagon effect*. Karena pada dasarnya partai politik menjadi pemegang peran utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan diberikan tujuan mulia, mandat dan tanggung jawab oleh konstitusi melalui pemerintahan daerah, presiden dan anggota legislatif terpilih yang diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum (Sabarudin, 2023).

Meskipun pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama berbagai elemen masyarakat, partai politik memiliki posisi penting dan juga strategis dalam melaksanakan fungsi penyampaian pendidikan politik. Sebagai aktor utama dalam sistem politik, partai politik khususnya Partai Nasdem Kabupaten Bandung memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada menyusun dan mengusung suatu kebijakan, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat yang sangat diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Partai Nasdem Kabupaten Bandung memiliki visi, misi dan ideologi yang jelas sehingga hal tersebut menjadi tanggungjawab partai untuk memperkenalkan ideologi mereka terhadap masyarakat. Melalui pendidikan politik ini Partai Nasdem Kabupaten Bandung mengedukasi pemilih dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Namun pelaksanaan pendidikan di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bandung menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya minat masyarakat, serta berbagai macam isu lokal dan nasional, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Partai Nasdem dalam melaksanakan pendidikan politik di Kabupaten Bandung dalam konteks menyikapi fenomena *bandwagon effect*. Studi ini akan menganalisis strategi, program serta mengidentifikasi tantangan dan

peluang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menulis judul **“PERAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DALAM PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENYIKAPI FENOMENABANDWAGON EFFECT DI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN PRESIDENTAHUN 2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang yang membahas pokok dari permasalahan yang ada , maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana peran Partai Nasdem dalam memberikan pendidikan politik untuk menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Partai Nasdem dalam memberikan pendidikan politik untuk menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Partai Nasdem dalam menerapkan pendidikan politik di Kabupaten Bandung pada pemilu 2024 dan secara khusus tujuan tersebut antara lain:

1. Mendeskripsikan peran Partai Nasdem dalam memberikan pendidikan politik untuk menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Partai Nasdem dalam memberikan pendidikan politik untuk menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga kegunaan secara teoritis dan juga praktis, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan juga gambaran dalam keilmuan politik dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih bijak lagi dan memiliki pemikiran kritis juga rasa tanggungjawab dalam politik dan juga diharapkan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang berkelanjutan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai fenomena *bandwagon effect* dalam politik.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi partai dan juga masyarakat:

a. Untuk Partai

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur partai dalam mengevaluasi kinerja partai mengenai pendidikan politik di Kabupaten Bandung dan memberikan masukan bagi Partai Nasdem dalam upaya memberikan pendidikan politik untuk menyikapi fenomena *bandwagon effect* di Kabupaten Bandung.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat lebih aktif dan masif dalam berperilaku politik juga memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pendidikan politik.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian mengenai peran Partai Nasdem dalam pendidikan politik dapat mencakup analisis terhadap sejauh mana partai tersebut memberikan pemahaman politik masyarakat, kontribusi mereka dalam membentuk kebijakan pendidikan politik, serta dampaknya terhadap partisipasi politik anggota partai dan masyarakat umum. Dalam penelitian ini diambil objek penelitian di Kantor DPD Partai Nasdem dan difokuskan pada analisis sejauh mana peran partai dan apa saja yang telah dilakukan partai dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. Lingkup penelitian ini terfokus pada partai politik yaitu Partai Nasdem Kabupaten Bandung. Penelitian ini akan menggali usaha dan upaya partai secara langsung di masyarakat.

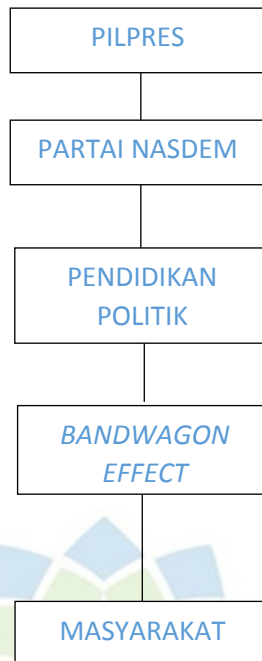
1.6. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah penelitian tentunya dibutuhkan sebuah kerangka berpikir yang ditujukan sebagai konsep dengan bertujuan untuk menjadikan penelitian memiliki arah yang jelas. Dalam negara demokrasi tentunya pemilu

merupakan ajang mencerminkan nilai demokrasi. Dan tentunya agar nilai demokrasi berlangsung dan terjaga dengan baik, dalam pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan baik. Selain itu dengan adanya fenomena yang terjadi dimasyarakat pada saat pemilu seperti *bandwagon effect* tentu dapat mempengaruhi kualitas partisipasi masyarakat.

Pendidikan politik dirasa masih perlu dilakukan sebagai penunjang daripada kemajuan pengetahuan politik masyarakat. Pada dasarnya pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memberikan pengetahuan mengenai sistem politik, hak dan kewajiban warga negara serta cara berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang lebih kritis. Maka dari itu peran Partai Nasdem dalam melaksanakan tugasnya mengenai pendidikan politik di masyarakat Kabupaten Bandung sangat perlu dilakukan, sebagaimana Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik yang berfokus pada gerakan perubahan dan reformasi.

Hal ini diharapkan guna mengurangi fenomena *bandwagon effect* yang terjadi akibat ketidaktahuan dan keterbatasan informasi masyarakat ataupun faktor-faktor lainnya. Sebagai partai politik yang mengusung narasi perubahan dan reformasi, Partai Nasdem Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui juga mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung juga hambatan partai yang tentunya mempengaruhi terhadap peranan partai itu sendiri. Berikut merupakan kerangka berfikir dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini.



Gambar 1. 1 Skema Konseptual

Berdasarkan skema konseptual yang terlihat dapat digambarkan hubungan antara variabel yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu khususnya terkait peran Partai Nasdem. Pemilu menjadi konteks utama dalam skema tersebut dimana pemilu merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang tentunya menjadi cikal bakal munculnya variabel lain. Pendidikan yang diberikan oleh Partai Nasdem berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan rasionalitas yang dipengaruhi atau terganggu oleh adanya fenomena *bandwagon effect*. Pendidikan politik oleh Partai Nasdem mempengaruhi masyarakat agar tidak berperilaku ikut-ikutan dalam pemilu.